

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dunia usaha termasuk usaha kecil menengah saat ini sangat cepat dan dinamis. Bank sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga lebih mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat.

Sebagai salah satu sektor usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang sering disebut dengan UMKM, diharapkan turut aktif dalam kegiatan investasi guna mendorong sektor produktif. Setidaknya terdapat tiga indikator yang menunjukkan peran penting UMKM dalam perekonomian. *Pertama*, jumlah usahanya yang banyak dan ada dalam setiap sektor ekonomi. Data BPS tahun 2007 mencatat bahwa jumlah UMKM mencapai 99,99% dari total unit usaha di Indonesia. *Kedua*, UMKM mempunyai potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor UMKM menyerap 97,3% dari total angkatan kerja yang bekerja. Dari setiap rupiah investasi di UMKM dapat menciptakan lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan investasi yang sama di usaha besar. *Ketiga*, UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan nasional.

Salah satu potensi yang mendapat perhatian pemerintah dan perlu dikembangkan adalah sektor usaha kecil dan menengah. Kondisi ini mengharuskan setiap pengusaha baik usaha kecil maupun menengah melakukan upaya demi menstabilkan atau lebih meningkatkan eksistensi usahanya. Salah satu masalah yang umumnya menjadi penghambat adalah masalah permodalan usaha kecil dan menengah. Masalah permodalan yang dihadapi mencakup aspek-aspek permodalan, masalah pembiayaan usaha, masalah akumulasi modal, serta cara memanfaatkan fasilitas dalam rangka pelaksanaan usahanya.

Pemberian kredit merupakan suatu usaha bank yang paling pokok, salah satu bentuk produk perkreditan yang akan peneliti bahas adalah kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dari kegiatan perkreditan tersebut maka bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya.

Dengan adanya unsur resiko dan ketidakpastian ini menyebabkan diperlukan suatu pengamanan kredit, baik pengamanan preventif maupun represif. Tujuan pengamanan ini adalah menghilangkan resiko atau setidaknya memperkecil resiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu pihak bank perlu meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap kredit agar memperkecil kemungkinan terjadinya kredit macet.

Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, karena adanya resiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu

pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan. Dengan kata lain diperlukan suatu pengendalian intern yang dapat menunjang kolektibilitas kredit itu sendiri. Dengan terselenggaranya pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam pemberian kredit tersebut.

Pengendalian intern merupakan proses untuk mencapai tujuan tertentu, diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai. Akan tetapi keterbatasan yang melekat pada pengendalian intern serta pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak. Hal ini disebabkan karena pengendalian intern dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir.

Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri. Bank melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin mengurangi resiko kegagalan kredit. Jika diteliti lebih dalam, kegagalan kredit terutama disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern.

Salah satu barometer untuk mengukur efektif atau tidaknya suatu pemberian kredit bisa dilihat dari rasio kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/267/KEP/DIR, tanggal 27 Pebruari 1998 tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan

cadangan, ditetapkan 5 (lima) golongan kolektibilitas kredit, yaitu: Lancar (*pass*), Perhatian Khusus (*Special Mention*), Kurang Lancar (*Sub Standard*), Diragukan (*doubtful*), dan Macet (*loss*). Dari lima criteria tersebut criteria pertama dan kedua yaitu Lancar (*pass*) dan Perhatian Khusus (*Special Mention*), digolongkan dalam criteria kredit efektif atau terjadi efektivitas pengembalian kredit. Menurut Lukman dendawijaya (2005:80) efektivitas pengembalian kredit memiliki pengertian sebagai berikut :

“Dalam kondisi yang ideal, nasabah memenuhi kewajibannya terhadap bank sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian kredit. Nasabah dapat (mampu dan mau) membayar angsuran pokok pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, sehingga kredit atau pinjaman bank akhirnya dinyatakan lunas.”

Sementara itu tiga kriteria yang lain yakni Lancar (*Sub Standard*), Diragukan (*doubtful*), dan Macet (*loss*), digolongkan dalam kategori kredit macet atau disebut NPL. Menurut Lukman dendawijaya (2005:79) bahwa terjadinya kegagalan kredit (kredit bermasalah atau kredit macet) terutama disebabkan oleh kelalaian dalam melakukan pengawasan kredit. Menurut Djohan (2000:173) salah satu sumber penyebab terjadinya kegagalan pengembalian kredit oleh nasabah atau penyebab terjadinya kredit bermasalah pada bank antara lain karena adanya pelanggaran prinsip-prinsip kredit oleh pimpinan bank yang menyetujui pemberian kredit yang mengandung resiko yang potensial menjadi kredit yang bermasalah (*Compromise of Credit Principles*) yang berarti melanggar bagian dari unsur-unsur pengendalian intern yaitu penilaian resiko kredit.

Dibawah ini adalah Uraian kolektibilitas kredit UMKM dari beberapa Bank per Juni 2011.

Tabel 1.1
Kolektibilitas Kredit UMKM per Juni 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Nama bank	L	DPK	KL	D	M	Total
1	Bank Central Asia	25.728.027	328.436	20.966	31.976	161.047	26.270.452
2	Bank Rakyat Indonesia	148.548.209	11.565.348	2.354.641	1.268.676	4.925.903	168.662.777
3	Bank Danamon	22.812.978	1.605.991	280.163	404.048	561.766	25.664.946
4	Bank Mayapada	1.026.563	140.473	2.763	4.352	22.170	1.196.321
5	BNI	50.994.110	2.928.781	472.637	626.854	2.982.454	58.004.836
6	Bank Bukopin	7.067.730	506.772	14.995	16.796	370.193	7.976.486
7	Bank Mandiri	34.009.344	2.543.164	185.145	318.575	783.691	37.839.919
8	Bank Mega	4.241.923	116.962	11.283	13.976	58.034	4.442.178
9	Bank Niaga	20.315.819	548.135	75.380	101.538	378.689	21.419.561
10	Bank Muamalat	197.161	38.555	4.156	3.263	14.986	258.121
11	Bank permata	3540463	264238	131998	27357	184148	4148204
12	BTN	9574712	983852	98392	52914	369249	11079119
13	Bank Artha Graha	9.965.638	648.293	88.358	97.759	35.548	10.835.596
14	Bank OCBC NISP	12.437.808	471.011	4.548	57.788	379.216	13.391.303
15	Bank Panin	128.287	18.684	5.587	254	6.075	161.173
16	BANK UOB Buana	11.578.548	225.800	22.407	12.841	250.768	12.090.364
17	Bank Saudara	283.062	13.363	1.738	1.958	15.744	315.865
18	Bank kesawan	392.108	22.877	2.284	280	14.544	432.093
19	Bank Nusantara Parahyangan	2.469.110	2.255	2.172	2.116	18.381	2.514.329
20	Bank Sinar mas	1.469.459	8.254	778	867	151	1.480.868
21	Bank Hana	434.707	8.641	1.017	1.329	13.797	459.491

22	Bank Mutiara	1.308.860	50.867		1.897	72.110	1.433.734
23	Bank kesejahteraan	1.665.203	47.496	104		13.244	1.726.047
24	Bank Bjb	3.742.538	339.621	43.805	78.591	301.616	4.506.171
25	Bank Agro Niaga	475.233	4.159	121	297	40.051	519.861
26	Bank Nagari	7.962.483	139.743	17.478	22.156	187.996	8.329.856
27	Bank Anda	640.111	11.031	5.299		1.042	657.483
28	Bank Ekonomi raharja	2.586.003	10.240	241	726	8.763	2.605.973
29	Bank Bumi Artha	573.298	2.185	410	93	9.255	585.241
30	Bank Syariah mandiri	966.052	91.891	26.058	11.942	11.713	1.107.656
31	bank Bukopin Syariah	356.986	7.490	2.896	625	4.289	372.286
32	Bank BNI Syariah	114.676	21.549	2.740	2.747	2.657	144.369
33	Bank Mega Syariah	1.458.561	77.299	9.289	2.053	1.778	1.548.980
34	Bank ICB Bumi Putera	673.586	36.693	3.668	12.397	115.725	842.069
35	BII	5.903.257	54.515	9.540	12.930	167.110	6.147.352

Tabel 1.2

Rasio Kredit Lancar UMKM per Juni 2011(%)

No.	Nama bank	kredit lancar
1	Bank Central Asia	97,94
2	Bank Rakyat Indonesia	88,07
3	Bank Danamon	88,89
4	Bank Mayapada	85,81
5	BNI	87,91
6	Bank Bukopin	88,61
7	Bank Mandiri	89,88
8	Bank Mega	95,49
9	Bank Niaga	94,85
10	Bank Muamalat	76,38
11	Bank permata	85,35

12	BTN	86,42
13	Bank Artha Graha	91,97
14	Bank OCBC NISP	92,88
15	Bank Panin	79,60
16	BANK UOB Buana	95,77
17	Bank Saudara	89,61
18	Bank kesawan	90,75
19	Bank Nusantara Parahyangan	98,20
20	Bank Sinar mas	99,23
21	Bank Hana	94,61
22	Bank Mutiara	91,29
23	Bank kesejahteraan	96,47
24	Bank Bjb	83,05
25	Bank Agro Niaga	91,42
26	Bank Nagari	95,59
27	Bank Anda	97,36
28	Bank Ekonomi raharja	99,23
29	Bank Bumi Artha	97,96
30	Bank Syariah mandiri	87,22
31	bank Bukopin Syariah	95,89
32	Bank BNI Syariah	79,43
33	Bank Mega Syariah	94,16
34	Bank ICB Bumi Putera	79,99
35	BII	96,03

Tingkat pengembalian kredit lancar tersebut dipengaruhi berbagai faktor, salah satu faktor yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah faktor pengendalian intern dari sistem kredit UMKM itu sendiri, bagaimana hubungan sistem pengendalian intern terhadap tingkat kolektibilitas kredit UMKM.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian skripsi ini dengan judul: “Hubungan Efektivitas Pengendalian Intern Kredit Terhadap Kolektibilitas Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank di Kota Bandung”.

Tuti Maria, 2012

Hubungan Efektivitas Pengendalian...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang penulis identifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengendalian intern kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah di perbankan kota Bandung
2. Bagaimana kolektibilitas kredit UMKM di perbankan kota Bandung
3. Apakah efektivitas pengendalian intern kredit mempunyai hubungan yang kuat terhadap kolektibilitas kredit UMKM di perbankan kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menggali atau mencari data dan informasi yang berhubungan dengan pengaruh efektivitas pengendalian intern kredit terhadap kolektibilitas kredit UMKM. Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui jalannya pengendalian intern yang diterapkan Bank penyelenggara kredit UMKM.
2. Mengetahui tingkat kolektibilitas kredit UMKM di perbankan kota Bandung.
3. Mengetahui hubungan pengendalian intern terhadap kolektibilitas kredit UMKM.

1.2 Kegunaan Penelitian

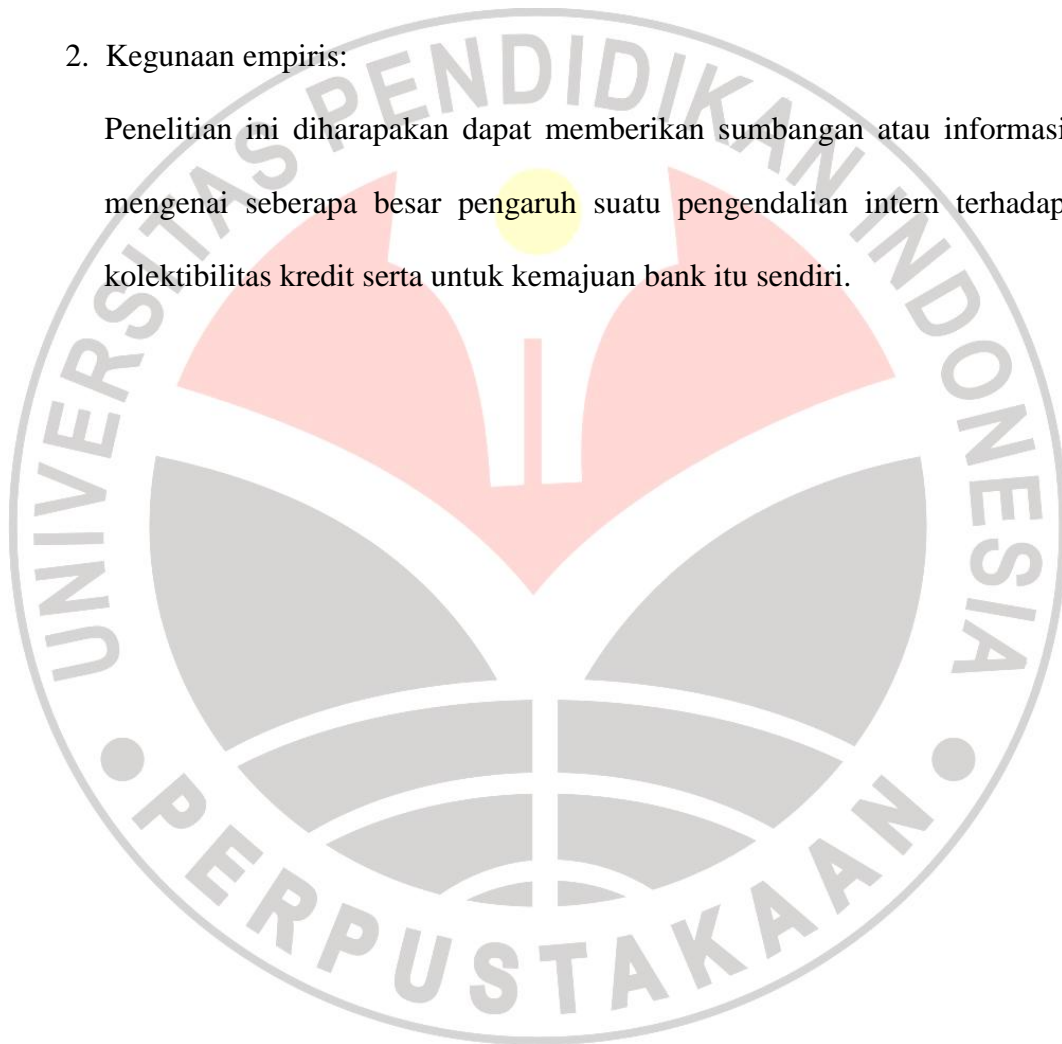
Hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari segi:

1. Kegunaan teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan di bidang pengendalian intern kredit khususnya menyangkut kolektibilitas kredit UMKM. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bermanfaat dan masukan sesuai dengan kebutuhan peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan empiris:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau informasi mengenai seberapa besar pengaruh suatu pengendalian intern terhadap kolektibilitas kredit serta untuk kemajuan bank itu sendiri.





Tuti Maria, 2012

Hubungan Efektivitas Pengendalian...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu